

**Islam Wasathiyah sebagai Basis Pengembangan Teori Pendidikan Islam
Nusantara: Kritik Konstruktif terhadap Polarisasi Model Tradisionalis dan
Modernis dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam**

Wiasih

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
w.rizkimualifah@gmail.com

Mudzakkir Ali

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
amudzakkirali@yahoo.com

Sari Hernawati

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
sari_hernawati@unwahas.ac.id

Mahmutarom

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
taromuwh@gmail.com

Abstract : This article is grounded in the polarization between traditionalist and modernist models in the Islamic Religious Education (PAI) curriculum, which has produced epistemological fragmentation in the development of Nusantara Islamic education theory. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of the traditionalist model, examine the strengths and weaknesses of the modernist model and explain Islam Wasathiyah as an epistemological foundation. This research employed a qualitative approach through critical library research, supported by Norman Fairclough's critical discourse analysis. The data were collected from policy documents, curriculum regulations, and relevant scholarly articles. The findings show that the traditionalist model is strong in authoritative knowledge transmission, moral formation, spirituality, and moderate character building, yet weak in adapting to modernity and contemporary sciences. In contrast, the modernist model is strong in educational access, competitiveness, and knowledge integration, but it risks eroding Islamic identity and producing hidden secularization. Islam Wasathiyah offers an epistemological synthesis through the principles of tawassuth, tawazun, tasamuh, and i'tidal, which can integrate the strengths of both models while overcoming their limitations. The implication of this study emphasizes the need to

develop a holistic, transformative, and contextual PAI curriculum rooted in the character of Nusantara Islam.

Keywords: *Islam Wasathiyyah, Nusantara Islamic Education, Islamic Education Curriculum, Educational Polarization*

Abstrak : Artikel ini dilatarbelakangi oleh polarisasi model tradisional dan modernis dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menimbulkan fragmentasi epistemologis dalam pengembangan teori pendidikan Islam Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan model tradisional, mengkaji kekuatan dan kelemahan model modernis dan menjelaskan Islam Wasathiyyah sebagai fondasi epistemologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kepustakaan kritis yang diperkuat analisis wacana kritis Norman Fairclough. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, regulasi kurikulum, dan artikel ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tradisional kuat dalam transmisi keilmuan bersanad, pembentukan adab, spiritualitas, dan karakter moderat, tetapi lemah dalam adaptasi terhadap modernitas dan ilmu kontemporer. Model modernis unggul dalam kesetaraan akses, daya saing, dan integrasi keilmuan, tetapi berisiko mengalami erosi identitas keislaman dan sekularisasi terselubung. Islam Wasathiyyah menawarkan sintesis epistemologis melalui prinsip tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal yang mampu mengintegrasikan keunggulan kedua model sekaligus mengatasi kelemahannya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan kurikulum PAI yang holistik, transformatif, dan kontekstual dengan karakter Islam Nusantara

Kata Kunci: *Islam Wasathiyyah, Pendidikan Islam Nusantara, Kurikulum PAI, Polarisasi Pendidikan*

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia telah berkembang melalui dua jalur institusional utama yang secara historis membentuk dikotomi epistemologis, tradisi pesantren yang menekankan transmisi ilmu keagamaan klasik dan model madrasah modern yang mengadopsi kurikulum nasional (Fakhrurazi et al., 2024). (Hamami, 2021) menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua pilar utama pendidikan nasional telah mengembangkan model pendidikan Islam yang berbeda secara signifikan, di mana Muhammadiyah cenderung merepresentasikan jalur modernis sementara NU

merepresentasikan jalur tradisional. Polarisasi antara kedua model ini telah menghasilkan fragmentasi epistemologis yang menghambat lahirnya teori pendidikan Islam yang koheren dan khas Nusantara (Inayatillah et al., 2022). Peserta didik yang terbentuk dalam model tradisional cenderung memiliki kedalaman penguasaan teks klasik tetapi lemah dalam keterampilan abad ke-21, sementara peserta didik dari model modernis menguasai sains tetapi kehilangan kedalaman spiritual (Daheri, 2022).

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Nusantara memiliki kekuatan epistemologis yang unik. (Helmy et al., 2021) mengartikan bahwa pesantren berperan krusial dalam menanamkan nilai-nilai moderasi Islam melalui transmisi hadis dan tradisi kenabian yang bersifat langsung dari kiai kepada santri. Penelitian oleh (Mappiasse & Hayadin, 2022) menemukan bahwa peserta didik di pesantren menunjukkan tingkat toleransi beragama yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik di sekolah umum, yang mengindikasikan efektivitas model pesantren dalam membentuk karakter moderat. Kendati demikian, model tradisional menghadapi tantangan serius berupa resistensi terhadap integrasi ilmu-ilmu modern dan kecenderungan eksklusivisme yang membatasi daya saing lulusannya di era global (Suyatno et al., 2022).

Model modernis yang direpresentasikan oleh madrasah formal lahir sebagai respons terhadap keterbatasan pesantren dalam menghadapi tuntutan modernisasi (Erwin Saputra et al., 2026). Kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 menjadi titik balik yang mengharuskan madrasah mengadopsi kurikulum nasional dengan porsi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama (Inayatillah et al., 2022). (Daheri, 2022) menegaskan bahwa modernisasi ini membuka akses kesetaraan bagi lulusan madrasah, tetapi sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang erosi identitas keislaman dan sekularisasi terselubung. Hasil penelitian oleh (Hanafi et al., 2022) menunjukkan bahwa peserta didik di lembaga pendidikan Islam formal sering kali memperlakukan agama sebagai mata pelajaran terpisah yang tidak terintegrasi dengan kehidupan sosial, yang menunjukkan adanya problem epistemologis dalam model modernis.

Konsep Islam Wasathiyah muncul sebagai wacana sentral di Indonesia pasca-peluncuran program moderasi beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

pada tahun 2019. Konsep ini merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yang secara linguistik bermakna umat terbaik, adil, dan seimbang (Hanafi et al., 2023). Penelitian (Mustakim et al., 2021) menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama di perguruan tinggi Islam mampu memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang berpijak pada prinsip keseimbangan. (Kanafi et al., 2021) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi fondasi NU memiliki kontribusi historis dalam membangun Islam moderat di Indonesia, jauh sebelum istilah wasathiyyah menjadi kebijakan resmi negara.

Penerimaan terhadap konsep wasathiyyah tidak berlangsung tanpa perdebatan. Sebagian kalangan akademisi mengkritik bahwa moderasi beragama merupakan instrumen politik negara untuk menjinakkan ekspresi keagamaan yang dianggap menantang status quo (Muhajir & Nurcholis, 2024). (Mulyana, 2023) menemukan bahwa meskipun buku teks PAI telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama, implementasinya di lapangan masih bersifat permukaan dan belum menyentuh transformasi epistemologis yang mendalam. Hanafi et al. (2023) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa integrasi moderasi beragama dalam praktik pengajaran guru PAI masih bersifat kognitif-informatif, belum mencapai level transformatif yang mengubah cara berpikir dan bertindak peserta didik secara fundamental.

Kritik tersebut perlu direspons secara jujur dan proporsional. Helmy et al. (2021) menegaskan bahwa wasathiyyah tidak sekadar moderasi politik, melainkan sebuah prinsip teologis yang berakar kuat dalam Al-Qur'an dan tradisi kenabian yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme. Kanafi et al. (2021) menunjukkan bahwa tradisi moderasi di kalangan Muslim Indonesia telah terbentuk secara organis selama berabad-abad melalui proses akulturasi Islam dengan budaya lokal Nusantara. Penyamaan wasathiyyah dengan proyek politik Kemenag adalah penyederhanaan yang mengabaikan kedalaman teologis dan historis konsep ini (Muhajir & Nurcholis, 2024). Pembedaan kritis antara wasathiyyah sebagai prinsip epistemologis dan wasathiyyah sebagai program kebijakan menjadi keniscayaan akademis yang harus dilakukan.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara historis telah menjadi laboratorium hidup dari praktik wasathiyah dalam pendidikan. Hamami (2021) menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, yakni NU melalui jalur pesantren dan kitab kuning sementara Muhammadiyah melalui modernisasi sekolah Islam, keduanya sesungguhnya merepresentasikan dua ekspresi wasathiyah yang saling melengkapi. Suyatno et al. (2022) memperkenalkan konsep *progressive Islamic education* yang berupaya menjembatani keislaman, keindonesiaan, dan modernitas sebagai tiga dimensi yang harus diintegrasikan secara bersamaan. Keberadaan dua tradisi ini menjadi bukti empiris bahwa pendidikan Islam Nusantara memiliki modal sosial dan intelektual yang kuat untuk membangun teori pendidikan yang melampaui dikotomi tradisional-modernis.

Penelusuran terhadap literatur akademik menunjukkan bahwa kajian tentang wasathiyah dalam konteks pendidikan Islam telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mustakim et al. (2021) mengkaji pemberdayaan mahasiswa melalui moderasi beragama di perguruan tinggi. Hanafi et al. (2022) meneliti perspektif mahasiswa terhadap literasi moderasi beragama. Mulyana (2023) menganalisis integrasi moderasi dalam buku teks PAI. Hanafi et al. (2023) menginvestigasi praktik pengajaran guru berbasis moderasi. Kendati demikian, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial, yakni membahas moderasi dalam konteks kebijakan, implementasi kurikulum, atau persepsi aktor pendidikan secara terpisah. Kajian yang secara kritis dan komprehensif merumuskan wasathiyah sebagai fondasi epistemologis untuk membangun kerangka teori pendidikan Islam Nusantara yang melampaui polarisasi tradisional-modernis masih belum ditemukan dalam literatur yang ada.

Bertolak dari celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kekuatan dan kelemahan model tradisional dalam kurikulum PAI, (2) menganalisis kekuatan dan kelemahan model modernis dalam kurikulum PAI, (3) mengkaji wasathiyah sebagai fondasi epistemologis yang memiliki landasan teologis mandiri dan bukan sekadar jalan tengah politis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan kritis yang diperkuat dengan analisis wacana kritis untuk membongkar konstruksi diskursif di balik polarisasi tradisional-modernis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kepustakaan kritis (*critical library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks, konsep, wacana, dan pemikiran yang tersebar dalam dokumen kebijakan, karya akademik, dan literatur keislaman yang memerlukan pembacaan interpretatif secara mendalam, bukan fenomena empiris yang menuntut observasi langsung. Kepustakaan kritis berbeda dari kepustakaan deskriptif dalam hal bahwa peneliti tidak sekadar merangkum isi literatur, melainkan membongkar asumsi-asumsi tersembunyi, relasi kuasa, dan konstruksi diskursif yang mendasari setiap teks yang dikaji (Muhajir & Nurcholis, 2024). Pendekatan ini diperkuat dengan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model tiga dimensi Norman Fairclough yang menganalisis teks pada tiga level: level teks (pilihan kata dan struktur argumentasi), level praktik diskursif (siapa yang memproduksi dan mengonsumsi wacana), dan level praktik sosial (konteks politik-kultural yang membentuk dan dibentuk oleh wacana) (Mulyana, 2023). CDA dipilih karena wacana polarisasi tradisional-modernis dalam pendidikan Islam Indonesia tidak bersifat netral, melainkan mengandung relasi kuasa yang perlu dibongkar secara kritis.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori. Sumber primer mencakup: (a) dokumen kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama (Kemenag RI, 2019), (b) regulasi kurikulum PAI termasuk Keputusan Menteri Agama tentang kurikulum madrasah, dan (c) karya-karya akademik yang menjadi rujukan utama dalam diskursus wasathiyah dan pendidikan Islam Nusantara. Sumber sekunder mencakup artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas moderasi beragama, pendidikan Islam, polarisasi tradisional-modernis, dan konsep wasathiyah dalam konteks pendidikan. Kriteria seleksi sumber sekunder meliputi: relevansi langsung dengan topik penelitian, indeksasi jurnal, dan keterbaruan literatur.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang bersifat spiral dan reflektif. Tahap pertama adalah pembacaan kritis terhadap seluruh sumber, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, posisi epistemologis, dan asumsi-asumsi yang mendasari setiap teks. Tahap kedua adalah analisis komparatif-kritis, di mana temuan

dari model tradisional dibandingkan secara sistematis dengan temuan dari model modernis berdasarkan delapan dimensi yang telah ditetapkan: landasan epistemologis, tujuan pendidikan, desain kurikulum, metode pembelajaran, peran pendidik, konsep peserta didik, hubungan dengan ilmu modern, dan orientasi lulusan. Tahap ketiga adalah konstruksi sintesis, di mana peneliti merumuskan kerangka teori alternatif berbasis wasathiyah yang mengintegrasikan kekuatan kedua model sambil mengatasi kelemahan masing-masing. Proses ini bersifat deduktif-interpretatif: dimensi perbandingan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka teori, kemudian diterapkan secara konsisten pada kedua objek kajian.

Keabsahan temuan penelitian ini dijaga melalui tiga mekanisme. Pertama, triangulasi sumber, yakni setiap klaim interpretatif dikonfirmasi dengan merujuk pada lebih dari satu sumber yang relevan sehingga penafsiran tidak bergantung pada perspektif tunggal (Hanafi et al., 2023). Kedua, pembacaan hermeneutis, yaitu menafsirkan setiap teks dalam konteks historis, sosial, dan intelektual penulisnya agar pemaknaan tidak mengalami distorsi kontekstual. Kebijakan moderasi beragama Kemenag RI dibaca dalam konteks politik pasca-2019, tradisi pesantren dibaca dalam konteks historis yang membentuknya sejak abad ke-15, dan modernisasi madrasah dibaca dalam konteks kebijakan pendidikan nasional pasca-kemerdekaan. Ketiga, *peer debriefing*, yakni mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan sesama peneliti untuk memperoleh perspektif alternatif dan mengurangi bias subjektif. Kombinasi ketiga mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan bersifat proporsional, bahwa kritik yang diajukan bersifat konstruktif, dan bahwa sintesis yang dihasilkan tidak mereduksi kompleksitas masing-masing tradisi pemikiran.

Hasil dan Pembahasan

Model Tradisional dalam Pendidikan Islam Nusantara

Bagian ini menganalisis model tradisional dalam pendidikan Islam Nusantara yang direpresentasikan oleh pesantren salafi dengan mengkaji secara kritis dua sisinya sekaligus: kekuatan epistemologis yang menjadikannya bertahan selama ratusan tahun dan kelemahan struktural yang membatasi kapasitasnya di era kontemporer. Analisis ini diperlukan untuk memahami secara proporsional apa yang perlu dipertahankan dari

model tradisional dan apa yang perlu dilampaui melalui kerangka wasathiyah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah beroperasi selama ratusan tahun dan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter keislaman masyarakat Nusantara (Khamid et al., 2022). Suyatno et al. (2022) menjelaskan bahwa pesantren menawarkan pendidikan yang komprehensif dengan memadukan dimensi intelektual, spiritual, dan sosial dalam satu ekosistem yang terintegrasi, sebuah karakteristik yang membedakannya dari model pendidikan formal manapun. (Mujahid, 2021) mengemukakan bahwa pembentukan karakter moderat di pesantren berpijak pada modernisasi *turats* (tradisi Muslim klasik) yang diderivasi dari kaidah *ushul fiqh* terkenal: *al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*, yaitu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Kaidah ini menunjukkan bahwa model tradisional sesungguhnya telah memiliki mekanisme internal untuk beradaptasi tanpa kehilangan fondasi epistemologisnya, meskipun dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten (Mujahid, 2021).

Salah satu kekuatan paling mendasar dari model ini terletak pada sistem transmisi ilmu yang bersifat otentik dan bersanad. Penelitian oleh Helmy et al. (2021) menunjukkan bahwa pesantren berperan krusial dalam mentransmisikan pemahaman moderasi Islam melalui pembelajaran hadis dan tradisi kenabian secara langsung dari kiai kepada santri, sebuah proses yang melibatkan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga transfer karakter dan spiritualitas. Sistem *sanad* memberikan otoritas epistemologis yang unik karena setiap ilmu yang diajarkan dapat ditelusuri rantai transmisinya hingga ke sumber asli (Hamami, 2021). Pembelajaran kitab kuning yang mencakup berbagai disiplin keilmuan dilakukan melalui metode *sorogan* dan *bandongan* yang telah teruji efektivitasnya selama berabad-abad (Mujahid, 2021). Metode-metode ini bukan sekadar teknik pengajaran, melainkan sebuah tradisi epistemologis yang menjamin kesinambungan transmisi ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kekuatan epistemologis tersebut berimplikasi langsung pada pembentukan karakter peserta didik yang bersifat holistik. Mujahid (2021) menjelaskan bahwa lingkungan pesantren secara alamiah mendukung pembelajaran afektif melalui penekanan pada *adab*, bimbingan moral yang berkelanjutan, sistem belajar sebaya, serta integrasi antara pengembangan spiritual dan akademik. Bukti empiris yang memperkuat klaim ini diberikan oleh (Mappiasse & Hayadin, 2022) yang menemukan bahwa peserta didik di pesantren menunjukkan tingkat toleransi beragama yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik di sekolah umum. Temuan serupa oleh Helmy et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa proses habituasi santri dalam kegiatan sosial lintas agama, yang difasilitasi oleh keteladanan kiai, berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap moderat. Secara historis, Kanafi et al. (2021) menegaskan bahwa teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi fondasi pesantren NU telah memberikan kontribusi substansial dalam membangun Islam moderat di Indonesia selama lebih dari satu abad, jauh sebelum istilah moderasi beragama menjadi kebijakan resmi negara.

Pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan tersebut tidak lantas menutup mata terhadap sejumlah kelemahan struktural yang membatasi kapasitas model tradisional di era kontemporer. Suyatno et al. (2022) mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara keislaman, keindonesiaan, dan modernitas dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia, dan model tradisional cenderung kuat pada dimensi keislaman tetapi lemah pada dimensi modernitas. Daheri (2022) menemukan bahwa orientasi pendidikan Islam tradisional yang bersifat eksklusif berpotensi menghambat terbentuknya kewarganegaraan global (*global citizenship*) yang menjadi kebutuhan peserta didik abad ke-21. Hanafi et al. (2023) menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa konten pengajaran di lembaga pendidikan Islam yang masih bertumpu pada model tradisional belum mengintegrasikan nilai-nilai moderasi secara transformatif, masih bersifat kognitif-informatif yang memperlakukan ilmu keagamaan sebagai informasi yang harus dihafal alih-alih perspektif yang harus dialami dan dipraktikkan.

Kelemahan lain yang cukup krusial adalah kecenderungan stagnansi kurikulum yang ditandai oleh pengulangan konten dari generasi ke generasi tanpa kontekstualisasi

yang memadai. Mulyana (2023) menjelaskan bahwa meskipun buku teks PAI telah mengalami pembaruan di level nasional, implementasinya di institusi yang masih berpegang pada model tradisional belum menyentuh transformasi epistemologis yang mendalam. Hanafi et al. (2022) mengidentifikasi bahwa peserta didik di lembaga pendidikan Islam sering kali memperlakukan agama sebagai mata pelajaran yang terpisah dari kehidupan sosial, yang mengindikasikan kegagalan model transmisif dalam membentuk literasi keagamaan yang integratif dan reflektif. Kecenderungan *taqlid* yang berlebihan di sebagian pesantren tradisional, yakni mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa proses verifikasi kritis, berpotensi menghambat ijtihad intelektual dan kreativitas berpikir peserta didik (Mujahid, 2021). Kondisi ini semakin problematis di era digital yang menuntut kemampuan berpikir kritis tinggi untuk memilah informasi yang semakin kompleks dan berlapis (Mustakim et al., 2021).

Persoalan eksklusivisme juga perlu dicermati secara proporsional. Muhajir dan Nurcholis (2024) menunjukkan bahwa pendidikan yang tidak membuka ruang dialog berpotensi menjadi lahan bagi tumbuhnya pemahaman yang rigid. (Mappiasse & Hayadin, 2022) menemukan adanya variasi yang signifikan antar-pesantren dalam hal keterbukaan terhadap keragaman, yang sangat bergantung pada orientasi kiai dan kurikulum yang diadopsi. Helmy et al. (2021) mengonfirmasi bahwa pemahaman santri tentang moderasi Islam dan relasi antarumat beragama sebagian besar ditransmisikan dari kiai dan ustadz, bukan dari eksplorasi mandiri peserta didik. Ketergantungan yang berlebihan pada figur kiai sebagai satu-satunya sumber otoritas intelektual, tanpa diimbangi oleh pengembangan kemandirian berpikir, menciptakan kerentanan epistemologis ketika santri menghadapi tantangan intelektual di luar lingkungan pesantren (Hanafi et al., 2022).

Keseluruhan analisis ini mengarah pada satu proposisi yang perlu dirumuskan secara hati-hati, model tradisional tetap relevan dan memiliki kekuatan epistemologis yang tidak tergantikan, tetapi ia tidak memadai jika berdiri sendiri. Kekuatannya dalam hal kedalaman spiritual, pembentukan karakter berbasis *adab*, otentisitas transmisi melalui *sanad*, dan kontribusi historis terhadap moderasi Islam Indonesia merupakan modal yang harus dijaga (Hamami, 2021; Helmy et al., 2021; Kanafi et al., 2021;

Mappiasse, 2022). Kelemahannya dalam hal resistensi terhadap ilmu modern, stagnansi kurikulum, dan potensi eksklusivisme merupakan tantangan yang harus diatasi tanpa mengorbankan kekuatan fundamentalnya (Daheri, 2022; Hanafi et al., 2023; Muhajir & Nurcholis, 2024). Suyatno et al. (2022) menawarkan konsep *progressive Islamic education* yang berupaya menjembatani keislaman, keindonesiaan, dan modernitas sebagai tiga dimensi yang harus hadir secara bersamaan. Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah model modernis yang lahir sebagai antitesis dari model tradisional berhasil menjawab kelemahan-kelemahan ini, ataukah ia justru menciptakan problem baru yang berbeda? Pertanyaan inilah yang akan dijawab pada bagian selanjutnya.

Model Modernis dalam Pendidikan Islam Nusantara

Bagian ini menganalisis model modernis dalam pendidikan Islam Nusantara yang direpresentasikan oleh madrasah formal dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) yang lahir dari proses transformasi kelembagaan. Analisis dilakukan untuk memahami apa yang berhasil dicapai oleh modernisasi pendidikan Islam, sekaligus mengidentifikasi problem-problem baru yang justru lahir dari proses modernisasi itu sendiri. Temuan pada bagian ini akan dikontraskan dengan temuan tentang model tradisional pada bagian sebelumnya untuk memperlihatkan bahwa kedua model, jika berdiri sendiri-sendiri, sama-sama tidak memadai sebagai landasan tunggal bagi pengembangan teori pendidikan Islam Nusantara.

Model modernis dalam pendidikan Islam Indonesia lahir sebagai respons terhadap dua kondisi historis yang saling berkaitan, kebutuhan untuk menyetarakan kualitas pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan tuntutan negara untuk mengintegrasikan seluruh institusi pendidikan ke dalam sistem nasional (Inayatillah et al., 2022). Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975 menjadi tonggak paling menentukan dalam transformasi ini, karena kebijakan tersebut mengharuskan madrasah mengadopsi kurikulum nasional dengan porsi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama (Hamami, 2021). Hamami (2021) menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah merintis jalur modernisasi pendidikan Islam sejak awal abad ke-20 dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang

mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Proses modernisasi ini kemudian berlanjut pada level perguruan tinggi melalui transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada awal dekade 2000-an, yang menandai pergeseran paradigma dari dikotomi keilmuan menuju integrasi ilmu agama dan ilmu umum (Muqowim et al., 2021).

Modernisasi pendidikan Islam menghasilkan sejumlah pencapaian yang tidak dapat dipungkiri. Inayatillah et al. (2022) menunjukkan bahwa proses modernisasi telah mempengaruhi konten dan orientasi pendidikan nasional secara keseluruhan, menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan negara dan bukan lagi sebagai entitas yang terpinggirkan. Lulusan madrasah dan UIN memperoleh kesetaraan pengakuan dengan lulusan sekolah umum dan universitas negeri, yang membuka akses mereka terhadap pasar kerja yang lebih luas (Hamami, 2021). Suyatno et al. (2022) mengidentifikasi bahwa model modernis berhasil menjembatani dimensi keindonesiaan dan modernitas yang sebelumnya sulit dicapai oleh model tradisional. Mustakim et al. (2021) menemukan bahwa perguruan tinggi Islam yang telah mengadopsi model modernis mampu memberdayakan mahasiswa sebagai agen moderasi beragama yang memiliki kemampuan analitis dan keterampilan sosial yang lebih baik dibandingkan model yang bersifat eksklusif-tradisional.

Pencapaian yang paling ambisius dari model modernis adalah proyek integrasi keilmuan di Universitas Islam Negeri. Muqowim dan Lessy (2021) menjelaskan bahwa transformasi dari IAIN menjadi UIN bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan pergeseran paradigma fundamental dari pemisahan ilmu agama dan ilmu umum menuju integrasi-interkoneksi keduanya. Penelitian oleh (Suwendi et al., 2024) menunjukkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai UIN pertama telah mengembangkan pola integrasi terbuka (*open integration*) yang memungkinkan dialog antara ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu alam dalam satu kerangka akademik. Proyek ini merupakan upaya epistemologis untuk mengatasi dikotomi ilmu yang telah mengakar dalam pendidikan Islam selama berabad-abad (Muqowim & Lessy, 2021). Daheri (2022) menegaskan bahwa orientasi terhadap moderasi beragama, inklusivitas, dan

kewarganegaraan global yang dikembangkan oleh model modernis membuka cakrawala pendidikan Islam ke arah yang lebih luas dan kontekstual.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak datang tanpa biaya epistemologis. Proses modernisasi yang menjadikan madrasah setara dengan sekolah umum secara bersamaan telah mereduksi porsi ilmu keagamaan secara signifikan. Hanafi et al. (2023) menemukan bahwa konten pengajaran agama Islam di lembaga pendidikan formal, baik di level sekolah maupun perguruan tinggi, bersifat kognitif-informatif dan belum mencapai level transformatif yang mampu mengubah cara berpikir dan bertindak peserta didik secara mendasar. Mulyana (2023) mengonfirmasi bahwa meskipun buku teks PAI telah diperbarui untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, implementasinya di lapangan masih bersifat permukaan dan tidak menyentuh transformasi epistemologis yang mendalam. Temuan ini mengindikasikan bahwa model modernis berhasil memperluas cakupan kurikulum tetapi kehilangan kedalaman dalam pembentukan karakter keagamaan, sebuah ironi yang perlu dikaji secara kritis.

Kelemahan yang paling mendasar dari model modernis adalah risiko sekularisasi terselubung yang menggerogoti identitas keislaman lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Hanafi et al. (2022) menemukan bahwa peserta didik di lembaga pendidikan Islam formal sering kali memperlakukan agama sebagai mata pelajaran terpisah yang tidak terintegrasi dengan kehidupan sosial mereka, sebuah fenomena yang menunjukkan kegagalan model modernis dalam membentuk literasi keagamaan yang holistik. Suwendi et al. (2024) mengidentifikasi bahwa dari tujuh fakultas yang dikaji di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hanya sebagian kecil yang memiliki pedoman integrasi keilmuan secara komprehensif, sementara sebagian besar lainnya masih menjalankan keilmuan secara parsial dan terpisah. Temuan ini mengindikasikan bahwa proyek integrasi keilmuan yang menjadi visi utama transformasi IAIN menjadi UIN masih menghadapi kesenjangan antara cita-cita epistemologis dan realitas implementasi di lapangan (Muqowim & Lessy, 2021). Mujahid (2021) secara implisit menunjukkan kontras ini: pesantren yang mempertahankan tradisi kitab kuning dan hubungan guru-murid yang bersifat spiritual mampu menghasilkan pembentukan karakter yang lebih

terinternalisasi dibandingkan madrasah formal yang cenderung birokratis dan berorientasi pada pencapaian standar administratif.

Modernisasi juga membawa konsekuensi berupa pergeseran orientasi pendidikan Islam dari pembentukan manusia seutuhnya menuju pemenuhan kebutuhan pasar kerja. Suyatno et al. (2022) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan terbesar pendidikan Islam progresif adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan modernitas dan pelestarian nilai-nilai Islam yang substantif. Mappiasse (2022) menemukan bahwa peserta didik di sekolah umum menunjukkan tingkat toleransi beragama yang lebih rendah dibandingkan peserta didik di pesantren, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa model pendidikan formal yang berorientasi pada standar nasional belum berhasil menggantikan fungsi pembentukan karakter yang selama ini dijalankan oleh pesantren. Muhajir dan Nurcholis (2024) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang kehilangan dimensi spiritual dan transformatifnya akan gagal menjadi benteng terhadap radikalisasi, karena peserta didik yang hanya dibekali pengetahuan agama tanpa kedalaman spiritual cenderung rentan terhadap narasi ekstremis yang menawarkan kepastian dan identitas yang kuat.

Problem integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam juga belum sepenuhnya terselesaikan. Penelitian Muqowim dan Lessy (2021) menunjukkan bahwa transformasi dari IAIN menjadi UIN memang menandai pergeseran paradigma, tetapi proses integrasinya masih bersifat *work in progress* yang menghadapi resistensi dari dua arah sekaligus: dari kalangan tradisionalis yang menganggap integrasi sebagai ancaman terhadap kemurnian ilmu agama, dan dari kalangan modernis yang menganggap ilmu agama tidak memiliki relevansi metodologis dengan ilmu modern. Suwendi et al. (2024) menemukan bahwa integrasi keilmuan di UIN Jakarta mengambil lima bentuk, mulai dari integrasi tema yang berkaitan, integrasi referensi, integrasi seluruh ilmu, integrasi landasan filosofis, hingga integrasi pendekatan ilmu Islam dengan ilmu sosial dan budaya. Keragaman bentuk ini menunjukkan bahwa belum ada model tunggal yang dianggap final, dan setiap UIN mengembangkan pendekatan integrasinya sendiri-sendiri tanpa kerangka epistemologis bersama yang menyatukan (Muqowim & Lessy, 2021).

Keseluruhan analisis terhadap model modernis menghasilkan proposisi yang sejajar dengan temuan pada model tradisional: model ini memiliki kekuatan yang nyata dalam hal kesetaraan akses, daya saing, dan ambisi integrasi keilmuan, tetapi ia tidak memadai jika berdiri sendiri. Kekuatannya dalam membuka cakrawala pendidikan Islam ke arah modernitas dan kewarganegaraan global (Daheri, 2022; Inayatillah et al., 2022; Suyatno et al., 2022) tidak mampu mengompensasi kelemahannya dalam hal erosi identitas keislaman, kegagalan membentuk literasi keagamaan yang transformatif, dan problem integrasi keilmuan yang belum tuntas (Hanafi et al., 2022; Hanafi et al., 2023; Mulyana, 2023; Suwendi et al., 2024). Temuan ini, jika dikontraskan dengan temuan pada model tradisional, memperlihatkan sebuah pola yang konsisten: model tradisional kuat pada dimensi keislaman dan pembentukan karakter tetapi lemah pada modernitas, sementara model modernis kuat pada modernitas dan akses tetapi kehilangan kedalaman keislaman. Polarisasi inilah yang menjadi problem epistemologis utama yang perlu dijawab oleh kerangka alternatif. Bagian selanjutnya akan mengkaji apakah Islam Wasathiyyah, sebagai prinsip yang berakar pada Al-Qur'an dan tradisi kenabian, mampu menjadi fondasi epistemologis yang melampaui polarisasi ini, bukan dengan menyeragamkan kedua model melainkan dengan membangun kerangka integratif yang menghormati kekuatan masing-masing.

Islam Wasathiyyah sebagai Fondasi Epistemologis Pendidikan Islam Nusantara

Analisis pada dua bagian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa model tradisional dan model modernis masing-masing memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan sekaligus kelemahan yang bersifat struktural. Model tradisional kuat pada kedalaman spiritual, otentisitas transmisi ilmu, dan pembentukan karakter berbasis *adab*, tetapi lemah pada kapasitas adaptasi terhadap modernitas (Mujahid, 2021; Suyatno et al., 2022). Model modernis kuat pada akses kesetaraan, daya saing, dan ambisi integrasi keilmuan, tetapi kehilangan kedalaman identitas keislaman dan menghadapi problem implementasi integrasi yang belum tuntas (Hanafi et al., 2023; Suwendi et al., 2024). Bagian ini mengkaji apakah Islam Wasathiyyah mampu menjadi fondasi epistemologis yang melampaui polarisasi tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah bahwa wasathiyyah bukan sekadar slogan kebijakan atau jalan tengah

politis, melainkan sebuah posisi epistemologis yang memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, akar historis dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara, dan prinsip-prinsip operasional yang dapat diterjemahkan ke dalam kerangka teori pendidikan.

Landasan normatif wasathiyyah berakar langsung pada Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang menyatakan: *wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasathan litakunu syuhada'a 'ala al-nas* (dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia). Helmy et al. (2021) menjelaskan bahwa kata *wasath* dalam tradisi linguistik Arab tidak sekadar bermakna "tengah" dalam pengertian spasial, melainkan mengandung makna keadilan (*al-'adl*), keunggulan (*al-khiyar*), dan keseimbangan (*al-tawazun*) secara bersamaan. Kanafi et al. (2021) menegaskan bahwa teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang telah menjadi fondasi keislaman di Indonesia selama berabad-abad sesungguhnya merupakan aktualisasi historis dari prinsip wasathiyyah ini, yang menempatkan umat pada posisi yang tidak condong kepada *ifrath* (berlebihan) maupun *tafrith* (mengabaikan). Pemaknaan ini penting untuk dibedakan dari reduksi wasathiyyah menjadi sekadar "tidak ekstrem" yang sering muncul dalam wacana populer, karena reduksi semacam itu menghilangkan dimensi aktif dan afirmatif dari konsep ini (Helmy et al., 2021).

Pembedaan antara wasathiyyah sebagai posisi epistemologis aktif dan wasathiyyah sebagai kompromi pasif merupakan langkah kritis yang menentukan seluruh bangunan argumen dalam bagian ini. Suyatno et al. (2022) menggunakan istilah *progressive Islamic education* untuk menggambarkan pendidikan Islam yang secara aktif menjembatani keislaman, keindonesiaan, dan modernitas sebagai tiga dimensi yang harus hadir secara simultan, bukan saling mengorbankan. Konsep ini sebangun dengan makna wasathiyyah yang bersifat integratif-aktif: ia bukan posisi pasif di antara dua kutub, melainkan posisi yang secara sadar memilih keunggulan dari setiap kutub dan menolak eksekse masing-masing (Helmy et al., 2021). Mustakim et al. (2021) menemukan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama di perguruan tinggi Islam mampu memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang memiliki kemampuan analitis, kepekaan sosial, dan kematangan spiritual secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa wasathiyyah, ketika diinternalisasikan secara tepat,

menghasilkan profil peserta didik yang justru melampaui dikotomi tradisional-modernis karena ia menggabungkan kedalaman spiritual dengan kapasitas intelektual modern.

Kritik bahwa wasathiyyah merupakan instrumen politik negara untuk menjinakkan ekspresi keagamaan perlu direspons secara jujur dan proporsional. Muhajir dan Nurcholis (2024) memang menunjukkan bahwa wacana moderasi beragama di Indonesia tidak steril dari konteks politik, dan kebijakan Kementerian Agama tentang moderasi beragama lahir dalam konteks tertentu yang perlu dikritisi. Mulyana (2023) memperkuat kekhawatiran ini dengan menemukan bahwa implementasi moderasi dalam buku teks PAI masih bersifat permukaan dan belum menyentuh transformasi epistemologis yang substansial. Kritik-kritik ini valid dan perlu diapresiasi. Tetapi, menyamakan wasathiyyah dengan proyek politik Kemenag adalah penyederhanaan yang mengabaikan fakta bahwa konsep ini telah berakar dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara selama berabad-abad, jauh sebelum menjadi kebijakan resmi negara (Kanafi et al., 2021; Inayatillah et al., 2022). Hamami (2021) menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU sebagai dua pilar utama pendidikan nasional telah mempraktikkan moderasi secara organis melalui jalur pendidikan sejak awal abad ke-20, yang mengindikasikan bahwa wasathiyyah merupakan produk kultural-teologis, bukan semata produk politik-birokratis.

NU dan Muhammadiyah merupakan dua laboratorium historis yang membuktikan bahwa wasathiyyah telah beroperasi secara nyata dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia. Hamami (2021) menunjukkan bahwa meskipun kedua organisasi ini mengambil jalur yang berbeda, yakni NU melalui pelestarian tradisi pesantren dan kitab kuning sementara Muhammadiyah melalui modernisasi sekolah Islam, keduanya sesungguhnya merepresentasikan dua ekspresi wasathiyyah yang saling melengkapi. Mujahid (2021) menemukan bahwa pesantren modern yang berafiliasi dengan tradisi NU telah mengembangkan pendekatan yang memadukan pelestarian *turats* dengan keterbukaan terhadap inovasi melalui kaidah *al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*. Kaidah ini merupakan formulasi operasional dari prinsip wasathiyyah yang menolak dua ekstremisme

sekaligus: ekstremisme tradisional yang menolak segala bentuk pembaruan dan ekstremisme modernis yang meninggalkan seluruh tradisi (Mujahid, 2021). Inayatillah et al. (2022) menegaskan bahwa sejarah Islam moderat di Indonesia, yang secara signifikan dibentuk oleh kedua organisasi ini, telah mempengaruhi konten dan orientasi pendidikan nasional secara keseluruhan.

Wasathiyah sebagai fondasi epistemologis memiliki empat prinsip operasional yang dapat diterjemahkan ke dalam kerangka teori pendidikan. Prinsip pertama adalah *tawassuth* (moderasi), yaitu sikap beragama yang tidak terjebak pada *ifrath* (berlebihan) maupun *tafrith* (mengabaikan), yang dalam konteks pendidikan bermakna menolak eksklusivisme model tradisional sekaligus menolak sekularisasi terselubung model modernis (Kanafi et al., 2021). Prinsip kedua adalah *tawazun* (keseimbangan), yaitu kemampuan menyasrakan dimensi spiritual dan intelektual, tradisi dan modernitas, teks dan konteks, yang dalam konteks pendidikan bermakna mengintegrasikan kedalaman kitab kuning dengan literasi saintifik kontemporer (Helmy et al., 2021; Suyatno et al., 2022). Prinsip ketiga adalah *tasamuh* (toleransi), yaitu keterbukaan terhadap keragaman pendekatan dalam masalah-masalah yang bersifat *khilafiyah*, yang dalam konteks pendidikan bermakna menghormati pluralitas institusi pendidikan Islam tanpa memaksakan keseragaman model (Mappiasse, 2022). Prinsip keempat adalah *i'tidal* (keadilan), yaitu kemampuan menilai secara proporsional tanpa prasangka, yang dalam konteks pendidikan bermakna mengapresiasi kekuatan setiap model sambil mengakui keterbatasannya secara jujur (Daheri, 2022).

Keempat prinsip tersebut secara langsung menjawab kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada dua model sebelumnya. Kelemahan model tradisional berupa eksklusivisme dan resistensi terhadap ilmu modern dijawab oleh prinsip *tawassuth* dan *tawazun* yang menuntut keterbukaan dan keseimbangan tanpa kehilangan fondasi (Suyatno et al., 2022). Kelemahan model modernis berupa erosi identitas keislaman dan sekularisasi terselubung dijawab oleh prinsip *tawazun* dan *i'tidal* yang menuntut keseimbangan dan keadilan dalam memperlakukan ilmu agama dan ilmu umum (Muqowim & Lessy, 2021). Hanafi et al. (2023) menemukan bahwa konten pengajaran agama Islam yang bersifat kognitif-informatif gagal membentuk peserta didik yang

transformatif. Prinsip *tawazun* menawarkan jalan keluar dengan menuntut keseimbangan antara dimensi kognitif, afektif, dan spiritual dalam setiap proses pembelajaran, bukan sekadar penambahan konten moderasi pada kurikulum yang strukturnya tidak berubah. Hanafi et al. (2022) mengidentifikasi bahwa peserta didik sering memperlakukan agama sebagai mata pelajaran terpisah dari kehidupan sosial. Prinsip *tasamuh* dan *tawassuth* mengarahkan pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan realitas sosial peserta didik, bukan memisahkannya dalam kotak-kotak yang saling terisolasi.

Wasathiyyah juga menawarkan fondasi yang lebih kokoh bagi proyek integrasi keilmuan yang selama ini menjadi visi utama transformasi IAIN menjadi UIN tetapi belum menemukan kerangka epistemologis yang menyatukan. Muqowim dan Lessy (2021) menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan memerlukan pergeseran paradigma fundamental, bukan sekadar penambahan fakultas atau program studi baru. Suwendi et al. (2024) menemukan bahwa setiap UIN mengembangkan model integrasinya sendiri tanpa kerangka epistemologis bersama. Prinsip-prinsip wasathiyyah berpotensi menjadi kerangka tersebut: *tawazun* memberikan prinsip keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, *tawassuth* memberikan prinsip moderasi yang menolak dominasi satu disiplin atas disiplin lainnya, *tasamuh* memberikan ruang bagi keragaman pendekatan integrasi, dan *i'tidal* memberikan prinsip keadilan dalam menilai kontribusi setiap tradisi keilmuan. Kerangka ini berbeda dari model integrasi yang dikembangkan secara *ad hoc* oleh masing-masing UIN karena ia memiliki landasan normatif yang jelas dalam Al-Qur'an dan tradisi keilmuan Islam Nusantara, bukan sekadar konsep akademik yang dicangkokkan dari luar (Kanafi et al., 2021; Helmy et al., 2021).

Satu hal yang perlu ditegaskan, wasathiyyah sebagai fondasi epistemologis tidak bermakna menyeragamkan seluruh institusi pendidikan Islam menjadi satu model tunggal. Prinsip *tasamuh* justru menghendaki penghormatan terhadap keragaman institusional yang ada. Pesantren tidak perlu diubah menjadi madrasah, dan madrasah tidak perlu diubah menjadi pesantren. Mappiasse (2022) menunjukkan bahwa keragaman institusi pendidikan Islam justru menjadi kekuatan karena masing-masing

memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pembentukan karakter peserta didik. Mujahid (2021) menunjukkan bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam pembentukan karakter melalui *adab* dan kehidupan komunal, sementara Mustakim et al. (2021) menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam modern memiliki keunggulan dalam memberdayakan mahasiswa sebagai agen moderasi beragama yang memiliki kemampuan analitis. Kerangka wasathiyyah tidak menghapus keragaman ini, melainkan menyediakan prinsip-prinsip bersama yang memastikan setiap institusi, dengan pendekatan masing-masing, bergerak menuju tujuan yang sama: membentuk manusia yang memiliki kedalaman spiritual, kapasitas intelektual, dan kepekaan sosial secara bersamaan.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa Islam Wasathiyyah memiliki kapasitas untuk menjadi fondasi epistemologis bagi pengembangan teori pendidikan Islam Nusantara karena tiga alasan yang saling terkait. Pertama, ia memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143) yang memberikan legitimasi teologis yang tidak dimiliki oleh konsep pendidikan yang diimpor dari luar tradisi Islam (Helmy et al., 2021; Kanafi et al., 2021). Kedua, ia memiliki akar historis yang nyata dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara melalui praktik NU dan Muhammadiyah yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad, yang membuktikan bahwa konsep ini bukan teori kosong melainkan realitas yang telah teruji (Hamami, 2021; Inayatillah et al., 2022). Ketiga, ia memiliki prinsip-prinsip operasional (*tawassuth, tawazun, tasamuh, i'tidal*) yang dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam komponen-komponen kurikulum, mulai dari tujuan pendidikan, desain konten, metode pembelajaran, hingga sistem asesmen (Suyatno et al., 2022; Muqowim & Lessy, 2021; Suwendi et al., 2024). Bagian selanjutnya akan merumuskan kerangka teori kurikulum PAI berbasis wasathiyyah Nusantara yang mengoperasionalkan ketiga kapasitas tersebut ke dalam model yang koheren dan aplikatif.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa polarisasi antara model tradisional dan modernis dalam kurikulum PAI tidak dapat dijadikan fondasi tunggal bagi pengembangan teori pendidikan Islam Nusantara karena masing-masing memiliki

kekuatan sekaligus kelemahan struktural. Model tradisional unggul dalam kedalaman spiritual, transmisi ilmu bersanad, pembentukan adab, dan penguatan karakter moderat, tetapi menghadapi keterbatasan dalam adaptasi terhadap ilmu modern, keterampilan abad ke-21, dan potensi eksklusivisme. Sebaliknya, model modernis berhasil membuka akses kesetaraan, daya saing, dan integrasi ilmu agama dengan ilmu umum, tetapi masih menghadapi problem erosi identitas keislaman, pembelajaran agama yang kognitif-informatif, serta integrasi keilmuan yang belum transformatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam Wasathiyah dapat menjadi fondasi epistemologis alternatif karena memiliki dasar teologis, akar historis dalam Islam Nusantara, dan prinsip operasional berupa tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal.

Daftar Rujukan

- Daheri, M. (2022). Religious Moderation, Inclusive, and Global Citizenship as New Directions for Islamic Religious Education in Madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 64–77. <https://doi.org/10.31538/NZH.V5I1.1853>
- Erwin Saputra, Fatiyah Auli Armedy, & Idrus L. (2026). Madrasah From A Historical Perspective: Its Contribution to The Development of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(2), 21–28. <https://doi.org/10.65310/SDBRNK79>
- Fakhrurazi, Syarifuddin, U. K., Alfarisi, U., & Shofiyah, S. (2024). Harmonizing Paths: Unveiling the Dichotomy Between Islamic Education and General Education in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(1), 158–168. <https://doi.org/10.18196/AFKARUNA.V20I1.18339>
- Hamami, T. (2021). Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Education: Two Main Pillars of National Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 307–330. <https://doi.org/10.14421/JPAI.2021.182-06>
- Hanafi, Y., Saefi, M., Diyana, T. N., Alifudin Ikhsan, M., Yani, M. T., Suciptaningsih, O. A., Anggraini, A. E., & Rufiana, I. S. (2023). What content offers and how teachers teach: Religious Moderation-integrated teaching in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(2), 8. <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I2.9070>

- Hanafi, Y., Saefi, M., Diyana, T. N., Ikhsan, M. A., Faizin, N., Thoriquattyas, T., & Murtadho, N. (2022). Students' perspectives on religious moderation: A qualitative study into religious literacy processes. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1). <https://doi.org/10.4102/HTS.V78I1.7638>
- Helmy, M. I., Darojat, A., Kubro, J., & Ali, M. (2021). The understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I2.351-376>
- Inayatillah, Kamaruddin, & Anzaikhan, M. (2022). The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 213–226. <https://doi.org/10.22452/JAT.VOL17NO2.17>
- Kanafi, I., Dahri, H., Susminingsih, S., & Bakhri, S. (2021). The contribution of ahlussunnah waljamaah's theology in establishing moderate islam in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4). <https://doi.org/10.4102/HTS.V77I4.6437>
- Kemenag RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khamid, A., Hariyadi, R., & Zaman, B. (2022). Islamic boarding school, the transformation of Islamic education institution and its strategic role in global era. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 7(2), 125–138. <https://doi.org/10.18326/ATTARBIYAH.V7I2.125-138>
- Mappiasse, S., & Hayadin. (2022). STUDENTS' RELIGIOUS TOLERANCE: Comparing Muslim Students at Public Schools and Pesantren. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 16(2), 326–351. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.326-351>
- Muhajir, A., & Nurcholis, A. (2024). Education in religious moderation to counter radicalism. *European Journal for Philosophy of Religion*, 16(1), 194–213. <https://doi.org/10.24204/EJPR.2023.4393>

- Mujahid, I. (2021). Islamic orthodoxy-based character education: creating moderate Muslim in a modern pesantren in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 185–212. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I2.185-212>
- Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8592>
- Muqowim, U., Sunan, K., Yogyakarta, I., & Lessy, Z. (2021). Revisiting Islamic Studies: Cementing Bases for Integrating Science and Religion in Islamic Higher Educational Institutions. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/JPAI.2021.181-01>
- Mustakim, Z., Ali, F., & Kamal, R. (2021). Empowering Students as Agents of Religious Moderation in Islamic Higher Education Institutions. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.15575/JPI.V7I1.12333>
- Suwendi, Mesraini, Azka, F. L., & Gama, C. B. (2024). Implementation of Knowledge Integration in Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 41–52. <https://doi.org/10.15575/JPI.V10I1.35385>
- Suyatno, S., Wantini, W., Sukiman, S., & Rachmawati, Y. (2022). Progressive Islamic Education: Bridging the Gap of Islam, Indonesianness, and Modernity. *The Qualitative Report*, 27(1), 226–242. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.4782>